PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

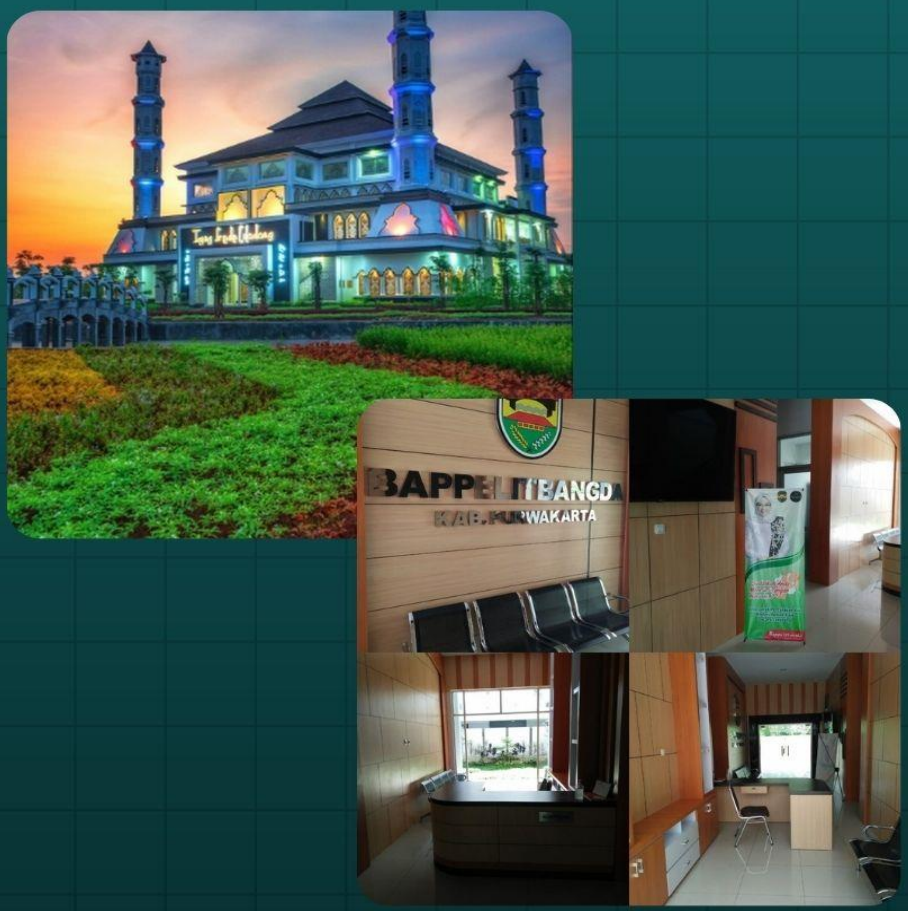

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peaturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2 Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Bayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat DPRD;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;
44. Kecamatan Campaka;
45. Kecamatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Perangkat Daerah lama yakni Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 137

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan rahmatnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Perubahan RENSTRA Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Delapan Bab, antara lain :

(1) Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

(2) Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda, Sumber Daya Bappelitbangda, Kinerja Pelayanan Bappelitbangda serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

(3) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Bappeda Jabar, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

(4) Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;

(5) Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;

(6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;

(7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta; dan

(8) Bab. Penutup memuat tentang ringkasan Perubahan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RENSTRA Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Bappelitbangda ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Bappelitbangda untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta ini diharapkan menjadi acuan bagi Bappelitbangda dan seluruh *stakeholder* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA,

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680911 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	**i**
DAFTAR ISI	.....	**iii**
DAFTAR TABEL	.....	**v**
DAFTAR GAMBAR	.....	**vi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
I.1.	Latar Belakang	I-1
I.2.	Landasan Hukum	I-3
I.3.	Maksud dan Tujuan	I-6
I.4.	Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA**	**II-1**
2.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda	II-3
2.2.	Sumber Daya Bappelitbangda	II-9
2.2.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	II-9
2.2.2	Aset dan Unit Usaha Yang Masih Operasional	II-14
2.3.	Kinerja Pelayanan Bappelitbangda	II-14
2.3.1	Pencapaian Kinerja Bappelitbangda	II-15
2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda	II-18
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda	II-37
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**	**III-1**
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-6
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat	III-10
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS	III-10
3.3.2	Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	III-15
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-21
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-28
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**IV-1**
4.1.	Tujuan	IV-1
4.2.	Sasaran	IV-2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2020	II-12
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II-13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	II-17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	II-19
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-9
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran Strategis Dalam Renstra Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	III-20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VII-2

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	II-8
Gambar 3.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	III-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -– 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, sehingga semua Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Personil Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Memberikan Informasi Kepada Para Pemangku Kepentingan tentang Rencana Program dan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Dalam Mengkoordinasikan dan Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan di Daerah.

3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta Terutama Terkait Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
4. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Menunjang Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Terutama Pada Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Yang Bersifat Tahunan.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Bappelitbangda merupakan satu bagian yang utuh dari

manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Dalam setiap tahunnya selama periode perencanaan, Perubahan Renstra Bappelitbangda akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyiapan Renja Bappelitbangda yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya dalam kaitan dengan Sistem Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappelitbangda akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA
- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Bappelitbangda

2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah merupakan salah satu proses penyusunan dokumen perencanaan, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara khusus melaksanakan penyusunan kajian atau penelitian ilmiah.

Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat dan instansi; serta
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA

Tugas Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Bappelitbangda bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mempunyai Fungsi :

a. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
c. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam Perangkat Daerah Tipe A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Bappelitbangda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappelitbangda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang Lingkup Bappelitbangda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappelitbangda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappelitbangda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Susunan Organisasi Bappelitbangda terdiri dari atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas :
    1. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
    2. Sub Bidang Pekerjaan Umum; dan
    3. Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
    1. Sub Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam;
    2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi; dan
    3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
    1. Sub Bidang Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

f. Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
   1. Sub Bidang Perencanaan;
   2. Sub Bidang Pembiayaan; dan
   3. Sub Bidang Evaluasi.

g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan, terdiri atas :
   1. Sub Bidang Penelitian;
   2. Sub Bidang Pengembangan Data dan Informasi; dan
   3. Sub Bidang Pelaporan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purwakarta

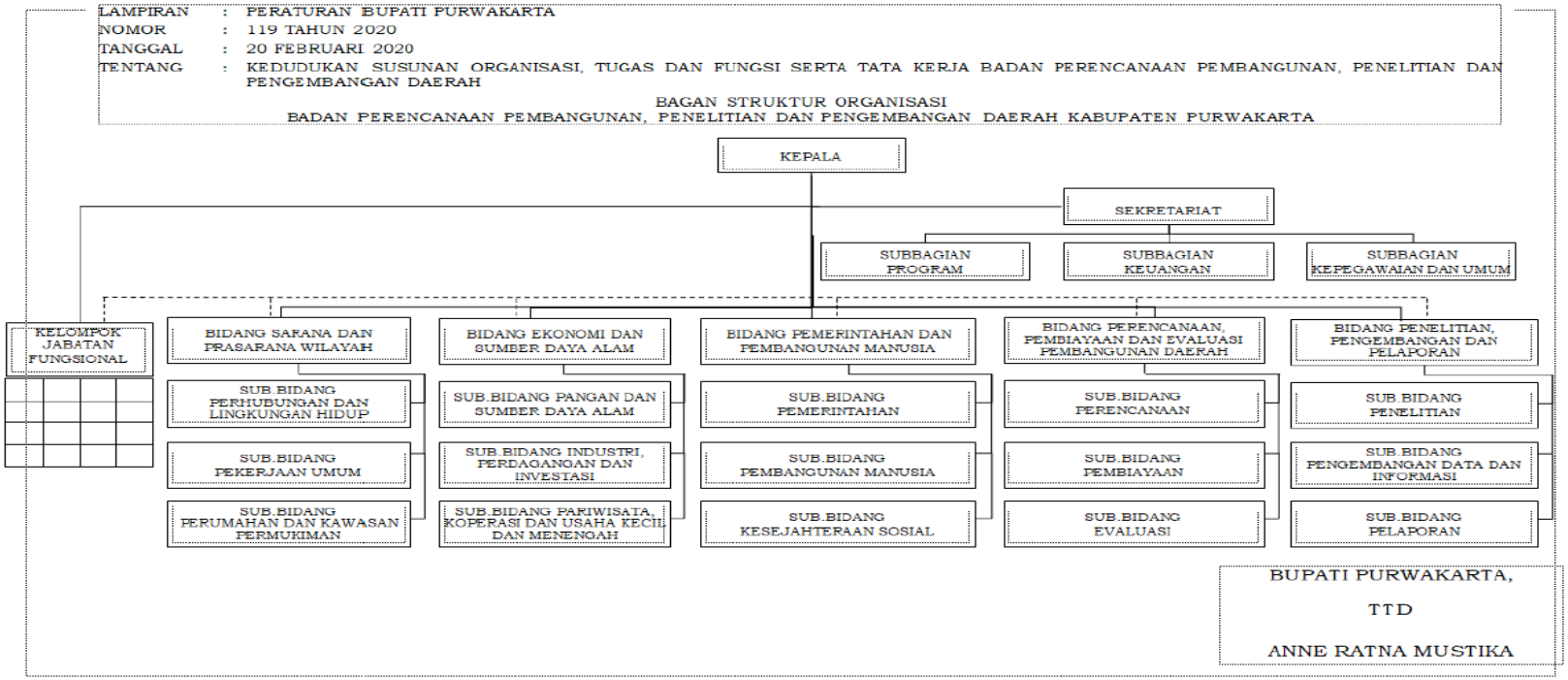

2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tersebut di atas adalah : 1 (Satu) Orang Eselon II; 6 (Enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (Satu) Orang Sekretaris, 5 (Lima) Orang Kepala Bidang serta 18 (Delapan Belas) Orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (Tiga) Orang Kasubbag, dan 15 (Lima Belas) Orang Kasubbid. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappelitbangda juga didukung oleh tersedianya 20 (Dua Puluh) Orang Pelaksana.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappelitbangda sebagai *center of knowledge* dan *learning organization.* Komposisi jumlah pegawai Bappelitbangda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) Orang Laki-Laki atau 63,64% dan perempuan sebanyak 16 (Enam Belas) Orang Perempuan atau 36,36%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappelitbangda berdasarkan tingkat golongan yaitu Golongan IV sebanyak 16 (Enam Belas) Orang atau 36,36%, Golongan III sebanyak 16 (Enam Belas) Orang atau 36,36% dan Golongan II sebanyak 12 (Dua Belas) Orang atau 27,27%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Adapun komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) sebanyak 1 (Satu) Orang atau 2,27%, Pasca Sarjana (S-2) 17 (Tujuh Belas) Orang atau 38,64%, Sarjana (S-1) sebanyak 14 (Empat Belas) Orang atau 31,82% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 12 (Dua Belas) Orang atau 27,27% seperti tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA	1	0	1
2.	SEKRETARIAT	9	2	11
3.	BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	2	4	6
4.	BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	5	2	7

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5.	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5	2	7
6.	BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5	1	6
7.	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	1	5	6
JUMLAH TOTAL		**28**	**16**	**44**

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitangda Tahun 2020

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah PNS	Golongan													
			IV					III					II				
			A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	KEPALA	**1**	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
2	SEKRETARIAT	**11**	2	1	0	0	**3**	0	0	1	1	**2**	0	0	2	4	**6**
3	BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	**6**	2	0	0	0	**2**	0	3	0	0	**3**	0	0	0	1	**1**
4	BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	**7**	2	0	0	0	**2**	0	1	1	2	**4**	0	0	1	0	**1**
5	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	**7**	3	0	0	0	**3**	1	0	0	1	**2**	0	0	1	1	**2**
6	BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**6**	1	0	0	0	**1**	1	0	0	3	**4**	0	0	1	0	**1**
7	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	**6**	4	0	0	0	**4**	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	**1**
	JUMLAH TOTAL	**44**	14	1	1	0	**16**	2	5	2	7	**16**	0	0	5	7	**12**

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitangda Tahun 2020

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan				
		S3	S2	S1	SMA	JUMLAH
1	KEPALA	1	0	0	0	**1**
2	SEKRETARIAT	0	3	2	6	**11**
3	BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	0	2	3	1	**6**
4	BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	0	3	3	1	**7**
5	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	0	3	2	2	**7**
6	BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0	2	3	1	**6**
7	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN	0	4	1	1	**6**
	JUMLAH TOTAL	**1**	**17**	**14**	**12**	**44**

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitangda Tahun 2020

2.2.2 ASET DAN UNIT USAHA YANG MASIH OPERASIONAL

Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Kendaraan Dinas baik Roda 4 (Empat) maupun Roda 2 (Dua), Saluran Telepon dan Faximile sebanyak 1 Line, Ruang Rapat yang memadai serta dapat menampung sampai dengan 50 orang, selain itu juga terdapat aset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Bappelitbangda, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bappelitbangda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari Indikator Kinerja Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel.2.4) dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah	8	8	8	8	8	6	6	6	7	8
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aspiratif dan Akuntabel	20	21	24	25	28	19	13	25	25	20
3	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah	7	7	7	7	7	8	7	5	6	4

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018 dan LKPJ Bupati Purwakarta Tahun 2013 - 2017

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA)	70.000.000,00	-	-	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Buku Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purwakarta	100.000.000.00	-	-	-	-	93.119.500,00	-	-	-	-
	Pengembangan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	70.000.000,00	155.000.000,00	125.000.000,00	200.000.000,00	-	69.285.000,00	94.400.000,00	122.200.000,00	99.300.000,00	-
	Pembuatan Multimedia Interaktif Profil Kabupaten Purwakarta	65.000.000,00	-	-	-	-	64.200.000,00	-	-	-	-
	Data Makro Bidang Sosial Budaya	75.000.000,00	-	-	-	-	62.135.000,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengkajian Industri Kreatif Kabupaten Purwakarta	100.000.000,00	-	-	-	-	96.900.000,00	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta	150.000.000,00	-	-	-	-	125.372.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	50.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	42.951.000,00	-	-	35.144.600,00	-
	Penyusunan Basis Data Bidang Sosial Budaya	-	75.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	73.975.000,00	72.842.000,00	100.000.000,00	89.571.000,00
	Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi	-	50.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	49.039.000,00	-	73.002.600,00	11.156.000,00
	Sosialisasi dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Tahun 2014	-	50.000.000,00	-	-	-	-	46.579.500,00	-	-	-
	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Purwakarta	-	100.000.000,00	-	-	-	-	97.525.000,00	-	-	-
	Analisis *District Health Account* (Pembiayaan Urusan Kesehatan) di Kabupaten Purwakarta	-	30.000.000,00	-	-	-	-	22.760.000,00	-	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam Proses Pembangunan	-	75.000.000,00	-	-	-	-	61.700.000,00	-	-	-
	Penyusunan Basis Data Bidang Fisik dan Prasarana	-	-	50.000.000,00	75.000.000,00	-	-		36.100.000,00	74.675.000,00	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna Tahun 2015	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	33.120.000,00	-	-
	Penyusunan Data Statistik Kabupaten Purwakarta	-	-	75.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	72.840.000,00	95.850.000,00	-
	Penyusunan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	98.400.000,00
	Penyusunan Basis Data Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	49.840.000,00
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta,	175.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	172.700.000,00	246.075.000,00	249.680.000,00	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2014	75.000.000,00	-	-	-	-	74.950.000,00	-	-	-	-
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50.000.000,00	-	-	-	-	35.650.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018	200.000.000,00	-	-	-	-	183.750.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	200.000.000,00	-	-	-	-	195.750.000,00	-	-	-	-
	Asistensi Penyusunan Renstra OPD Tahun 2013-2018	50.000.000,00	-	-	-	-	49.500.000,00	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	121.384.000,00	48.080.000,00	48.080.000,00	47.025.300,00	48.756.672,00	60.696.900,00
	Analisis Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta	100.000.000,00	-	-	-	-	97.725.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	79.970.000,00	68.660.000,00	97.500.000,00	99.200.000,00	49.250.000,00	75.538.000,00
	Penyusunan Buku Purwakarta Istimewa Dalam Peristiwa	100.000.000,00	-	-	-	-	84.120.000,00	-	-	-	-
	Sosialisasi Hasil Kajian Efektifitas Penggunaan Dana BOS Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Purwakarta	50.000.000,00	-	-	-	-	47.107.500,00	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	81.530.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	48.944.000,00	76.842.000,00
	Studi Penanganan Kawasan Rawan Bencana	100.000.000,00	-	-	-	-	94.155.000,00	-	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP II) Bappeda	187.000.000,00	-	-	-	-	138.915.000,00	-	-	-	-
	Dana Pararel Financing WISMP II (KPIU BAPPEDA)	91.600.000,00	-	-	-	-	68.375.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	-	-	-	-	93.709.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Pedoman Pemantapan Kawasan Lindung	75.000.000,00	-	-	-	-	67.807.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Buku Putih Sanitasi	250.000.000,00	-	-	-	-	104.750.000,00	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2015	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.499.800	-	-	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2015	-	125.000.000,00	-	-	-	-	125.000.000,00	-	-	-
	Workshop Perencanaan Pembangunan	-	80.000.000,00	-	-	-	-	73.110.000,00	-	-	-
	Sinergitas Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	75.000.000,00		-	-	-	74.950.000,00	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kajian Pendekatan Penyelesaian Permasalahan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Melalui Pendekatan Sosial Budaya	-	25.000.000,00	-	-	-	-	23.807.500,00	-	-	-
	Sawala Pembangunan Desa Berbudaya, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan desa berbudaya	-	85.400.000,00	-	-	-	-	83.900.000,00	-	-	-
	Sinergitas Pembangunan Urusan Pendidikan (Wajar 12 Tahun)	-	75.000.000,00	-	-	-	-	71.232.400,00	-	-	-
	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP-2) Bappeda Tahun 2014	-	237.525.000,00	-	-	-	-	206.774.100,00	-	-	-
	Dana Pararel Financing WISMP-2 KPIU Bappeda Tahun 2014	-	101.725.000,00	-	-	-	-	69.375.000,00	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	141.088.000,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	147.579.820,00	-	-
	Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Purwakarta	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	72.860.000,00	-	-
	Sawala Pembangunan 4 (Empat) Pilar Kebudayaan	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	198.500.000,00	-	-
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	32.006.250,00	27.640.500,00	-
	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP-2) Bappeda Tahun 2015	-	-	165.000.000,00	-	-	-	-	155.133.800,00	-	-
	Dana Palarel Financing WISMP-2 KPIU Bappeda Tahun 2015	-	-	101.725.000,00	-	-	-	-	86.863.000,00	-	-
	Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	7.419.000,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Roadmap Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Purwakarta	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	24.400.000,00	-	-
	Analisis *District Health Account* (Pembiayaan Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta)	-	-	40.000.000,00	-	-	-	-	24.777.400,00	-	-
	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Untuk Sekretaris Desa	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	98.684.000,00	-	-
	Peningkatan Capaian Pembangunan Bidang Sosial Budaya Melalui Pendekatan SDM	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	143.900.000,00	-	-
	Pendampingan Pewilayahan Komoditi Spesifik Lokasi Berdasarkan AEZ (Agro Ecological Zone) Skala 1:50.000	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	53.510.200,00	-	-
	Kajian Pembentukan Identitas Etnik Sunda Pada Pelajar di Kabupaten Purwakarta	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	147.530.000,00	-	-
	Penelitian dan Penyusunan Buku Tinjauan Histori Khazanah Tatar Sunda	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	197.300.000,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kompendium Pembangunan Kabupaten Purwakarta	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	195.176.000,00	-	-
	Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Banprop 2015)	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	95.000.000,00	-	-
	Penunjang Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purwakarta	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	73.232.800,00	-	-
	Kajian Pengaruh Religiusitas dan Budaya Sunda Terhadap Perilaku Moral Masyarakat Purwakarta	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	297.900.000,00	-	-
	Publikasi Sketsa Hasil Pembangunan di Purwakarta	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	196.830.000,00	-	-
	Kajian Persepsi Masyarakat di Daerah Perbatasan Terhadap Pembangunan Sosial Budaya di Kabupaten Purwakarta	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	197.600.000,00	-	-
	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-		139.630.000,00	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	96.171.000,00	-
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	98.882.800,00	-
	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	72.624.000,00	-
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016	-	-	-	175.000.000,00	-	-	-	-	141.433.300,00	-
	Sawala Pembangunan Desa Berbudaya	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.500.000,00	-
	Landscape Sosial Budaya Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	97.850.000,00	-
	Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	225.000.000,00	-	-	-	-	223.590.000,00	-
	Perkembangan Ekonomi Daerah dan Daya Saing di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	86.295.000,00	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP-2) Bappeda Tahun 2016	-	-	-	50.750.000,00	-	-	-	-	47.347.450,00	-
	Dana Pararel Financing WISMP-2 KPIU Bappeda Tahun 2016	-	-	-	55.724.000,00	-	-	-	-	53.959.000,00	-
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Desa	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	72.200.000,00	-
	Kajian Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Siswa di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	98.697.500,00	-
	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031	-	-	-	500.000.000,00	-	-	-	-	483.885.400,00	-
	Kajian Kepuasan Publik Terhadap Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.000.000,00	-
	Publikasi Buku Tinjauan History Khazanah Tatar Sunda di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	97.275.000,00	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dan Publikasi Buku Ngadegkeun Ajen Ki Sunda	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	180.548.000,00	-
	Seminar 2 (Dua) Masa Mengubah Desa	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	97.140.000,00	-
	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	-	-	-	75.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	74.400.000,00	100.000.000,00
	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (Banprop 2016)	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	97.742.600,00	-
	Pemutakhiran SSK Kabupaten Purwakarta	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	29.400.000,00	-
	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	178.202.085,00
	Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	179.578.081,00
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	86.841.600,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	93.224.000,00
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017	-	-	-	-	175.000.000,00	-	-	-	-	168.650.778,00
	Dana Pararel Financing WISMP-2 KPIU Bappeda Tahun 2017	-	-	-	-	76.000.000,00	-	-	-	-	66.431.857,00
	Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 Sesuai Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	93.212.400,00
	Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031	-	-	-	-	500.000.000,00	-	-	-	-	472.011.500,00
	Penyusunan Naskah Akademis Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	223.397.250,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	75.410.000,00	-	-	-	-	75.410.000,00
	Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	10.272.500,00
	Water Resources Sector Management Project (WISMP-2) Tahun 2017	-	-	-	-	145.300.000,00	-	-	-	-	132.989.213,00
	Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota (Banprop 2017)	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	99.829.800,00
	Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprop 2017)	-	-	-	-	750.000.000,00	-	-	-	-	618.095.050,00
	Penyusunan Feasibility Studi Revitalisasi Pasar Jumaah	-	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	221.176.500,00
	Penerapan Sistem E-Planning Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	199.132.800,00

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan DAK Tahun 2013	75.000.000,00	-	-	-	-	63.718.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	39.750.000,00	41.050.000,00	54.305.000,00	44.325.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	63.406.500,00	51.999.900,00	72.360.000,00	75.000.000,00	65.889.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	39.555.000,00	27.325.000,00	40.015.000,00	66.830.000,00	53.021.000,00
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2012	175.000.000,00	-	-	-	-	173.927.500,00	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012	70.000.000,00	-	-	-	-	64.400.000,00	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan DAK Tahun 2014	-	60.000.000,00	-	-	-	-	56.480.000,00	-	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2013	-	200.000.000,00	-	-	-	-	198.150.000,00	-	-	-
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013	-	70.000.000,00	-	-	-	-	63.143.000,00	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Evaluasi RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	34.325.000,00	-	-
	Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2014	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	185.960.000,00	-	-
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	46.518.000,00	-	-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	80.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	76.378.000,00	30.380.000,00
	Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	198.575.000,00	199.760.000,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	60.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	58.335.300,00	62.780.200,00
	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 Dengan RKPD Kabupaten Purwakarta	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	193.395.000,00	-
	Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun 2013 – 2017	-	-	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	349.250.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00

Sumber : LKPJ Bupati Purwakarta Tahun 2013 - 2017

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 bahwa yang menjadi Tantangan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 diantaranya adalah :

A. Kepastian Global

Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (*World Economic Outlook Database* IMF Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara

lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relative rendah.

B. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *egovernment*, inklusi keuangan melalui *financial technology* (*fin-tech*), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

C. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh

ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa *peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

D. Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang

rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

E. Pandemi Covid-19

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan

surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

F. Mitigasi Bencana Alam dan Non Alam

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan

teknologi mempunyai kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.

Dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dalam rangka mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan, maka lembaga ini harus memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis serta partisipasi masyarakat yang terus berkembang. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya dengan melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

A. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
B. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
C. Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
D. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
E. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;
F. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih perlu ditingkatkan;
G. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan.

Berdasarkan Tantangan Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut diatas, maka tantangan yang muncul dalam penyediaan pelayanan terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah :

A. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi pembangunan yang cepat, transparan dan akuntabel;
B. Tuntutan masyarakat terhadap realisasi usulan permasalahan pembangunan yang diusulkan;
C. Tuntutan dalam menindaklanjuti perubahan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah kedalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
D. Tuntutan dalam mengkoordinasikan informasi perencanaan pembangunan daerah yang cepat dan akurat;
E. Tuntutan dalam mengakomodir dan merealisasikan hasil kajian/penelitian kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan.

Sedangkan peluang yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dalam menindaklanjuti tantangan terhadap melaksanakan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan semua pihak adalah sebagai berikut :

A. Adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, termasuk kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir/ ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan;

B. Pemanfaatan aplikasi perencanaan (e_Planning) yang berbasis sistem melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
C. Komitmen dan partisipasi para stakeholder termasuk masyarakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
D. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi publik dalam menyampaikan informasi dan data terkait perencanaan dan hasil pembangunan daerah;
E. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Bappelitbangda bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappelitbangda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil teknokratik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif;
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;

5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti di tahun 2018 dan kebijakan Nasional berkaitan dengan moratorium penerimaan ASN yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan melainkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri,

pelaku usaha komonitas dan akademisi. Hal ini selaras dengan guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang kolaboratif. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program *follow Result*);
3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP);
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas; serta
6. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan

target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana *Pandemi Covid-19* yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang

berimplikasi pada adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya adalah

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu : “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”, dengan Misi sebagai berikut :

Misi Kesatu Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; *Misi Kedua*, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; *Misi Ketiga,* Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan *Misi Keempat*, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Misi Kesatu, memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa;
   b. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga;
   c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
   a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;
   b. Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja;
   c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Misi Kedua, memiliki tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran :
   a. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;
   b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas, dengan Sasaran :
   a. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
   b. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Misi Ketiga , memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, dengan Sasaran :
   a. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah;
   b. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan, dengan Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Misi Keempat, memiliki tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan Sasaran :

a. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
b. Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan;
c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif;
d. Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
e. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Perencanaan yang diselenggarakan Bappelitbangda maka fungsi dan tugas Bappelitbangda terkait erat dengan pencapaian Misi ke-2, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	1. Kurangnya SDM Perencana 2. Kurangnya Akurasi Perencanaan dan Data Kinerja	Belum Optimalnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	1. Penggunaan IT yang Telah Terintegrasi 2. Motivasi kerja yang kuat Dengan Pola Kerja yang Sistemik dan Terjadwal 3. Pelaksanaan Diklat Teknis Terkait Perencanaan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah :

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkualitas :

1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2) Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3) Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel : Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Misi-1	:	Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
Misi-2	:	Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

Misi 1 :

Tujuan 1	:	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
Tujuan 2	:	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 2 :

Tujuan 3	:	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 :

Sasaran Strategis 1	:	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
Sasaran Strategis 2	:	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan 2 :

Sasaran Strategis 3	:	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3 :

Sasaran Strategis 4	:	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berikut adalah Gambar Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 :

Gambar 3.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 :

Sumber : Renstra Bappenas Tahun 2020 - 2024

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, bahwa Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah : **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"**, dengan Misi sebagai berikut : *Misi Kesatu* Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; *Misi kedua*, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang

inovatif; *Misi Ketiga*, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; *Misi Kelima*, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran : a). Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; b). Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk; Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak; Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan; Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional; Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan; Menurunnya Tingkat Pengangguran; Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal; Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial.

Misi Ketiga, memilik 2 (dua) tujuan, yaitu : (1) Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuan Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: a) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; b) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; c) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan d) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan. Adapun tujuan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; b) Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik; c) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

Misi Keempat, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: a). Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya *good governance* dan *whole of government,* dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; b) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota."

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

Berdasarkan isu strategis diatas maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi Tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah : Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.

Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator *pertama*, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan *core business* Bappeda dan indikator *kedua*, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan serta mengharmonisasikan perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan telaahan terhadap sasaran strategis yang disusun dalam Dokumen Perencanaan atau Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dapat selaras dan harmonis dalam pelaksanaan perencanaannya. Adapun keselarasan antara Sasaran Strategis Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran Strategis dalam Renstra Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

Sasaran Dalam Renstra Bappenas	Sasaran Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional		
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner		2. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Sasaran Dalam Renstra Bappenas	Sasaran Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sasaran dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
4. Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung Oleh Kapabilitas SDM		3. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Sumber : Renstra Bappenas Tahun 2020 – 2024, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Bappeda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023

Secara umum sasaran strategis dalam Renstra Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta telah selaras dan harmonis, termasuk sasaran strategis terkait penelitian dan pengembangan yang dapat dipadukan kedalam sasaran strategis perencanaan pembangunan karena dapat saling mendukung dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat

pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu :

a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi :
    1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
    2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
    3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
    4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.

b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi :

1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.

c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi :
1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.

d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi :
   1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
   2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
   4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
   5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.

e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi :
   1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
   2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
   3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;

4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;

f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

KLHS disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappelitbangda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1) Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2) Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat pemerintahan;
3) Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
4) Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappelitbangda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1 TUJUAN

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-saran yang ingin dicapai. Dalam menentukan Tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka Tujuan Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta adalah: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Strategik dan Berkelanjutan.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Langkah-Langkah Perumusan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Menelaah Pernyataan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Dalam Rancangan Awal RPJMD;
2. Menelaah Pernyataan Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang Telah Dibuat;
3. Merumuskan Pernyataan Sasaran untuk Masing-Masing Tujuan;
4. Merumuskan Rancangan Indikator Kinerja Sasaran (*Impact*) dan Target Indikator yang Terukur dari setiap Sasaran;

5. Merumuskan Kembali Konsistensi Pernyataan Sasaran terhadap Tujuan dan Melakukan Penyempurnaan Bila Diperlukan.

Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan;
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dari aspek perencanaan melalui 3 (Tiga) Indikator, yaitu :

1) Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran;
2) Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan;
3) Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran*	Indikator Sasaran*	Satuan	Target Kinerja					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Strategik dan Berkelanjutan	1. Persentase Nilai Kualitas Perencanaan Pembangunan			Persen	80	80	80	81	82	83
		1. Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	1 Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	Persen	85	86	87	88	89	90
		2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan	2 Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persen	80	80	80	81	82	83

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran*	Indikator Sasaran*	Satuan	Target Kinerja					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
		Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Kajian Pembagunan Daerah	Persen	50	50	60	65	70	75

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta memperhatikan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup daerah kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas Bappelitbangda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappelitbangda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Strategik dan Berkelanjutan	1.1 Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Managemen Kebutuhan Kantor	1.1.1.1 Meningkatkan Pemenuhan Managemen Kebutuhan Kantor
		1.2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan	1.2.1 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis	1.2.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/ Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Daerah
		1.3 Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	1.3.1 Menyediakan Kebutuhan Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan Yang Akurat	1.3.1.1 Menyusun Kajian-Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019 - 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**						**6.083.169.049**		**5.061.092.000**		**15.364.085.132**		**15.950.097.686**		**16.784.287.795**		**59.242.731.662**	
5,01	**Perencanaan**						**6.083.169.049**		**4.786.092.000**		**14.599.508.203**		**15.145.530.290**		**15.937.641.524**		**56.551.941.066**	
4.03.4.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**648.720.725**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**648.720.725**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor	Persen	100	100	100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	100	100	100	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	115.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	100	100	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kualitas	Persen	100	100	100	58.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	58.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persen	100	100	100	52.120.725	-	-	-	-	-	-	-	-	100	52.120.725	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persen	100	100	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	100	100	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.23	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Persen	100	100	100	24.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Persen	100	100	100	58.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	58.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.27	Festival Purwakarta Istimewa	Meningkatnya Kualitas Festival Purwakarta Istimewa	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**828.461.975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**828.461.975**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Mebeleur	Persen	100	100	100	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	125.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	100	100	100	78.461.975	-	-	-	-	-	-	-	-	100	78.461.975	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.02.47	Lanjutan Renovasi Gedung Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Lanjutan Renovasi Gedung Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**179.030.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**179.030.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.05.	Penguatan Kapasitas SDM Bappeda dan Litbang	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Bappeda dan Litbang	Persen	100	100	100	179.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	179.030.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**51.535.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**51.535.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	6.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6.535.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.06.07	Penyusunan Rencana Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06.08	Penataan Dokumen	Meningkatnya Kualitas Penataan Dokumen	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.06.09	Penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023	Persen	100	100	100	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07	**Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran**						**-**		**2.590.642.000**		**-**		**-**		**-**		**2.590.642.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	**Persen**	**80**	**80**			**83**		**-**		**-**		**-**		**83**		
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	**Persen**	**82**	**82**			**85**		**-**		**-**		**-**		**85**		
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	**Persen**	**85**	**85**			**87**		**-**		**-**		**-**		**87**		
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persen**	**100**	**100**			**100**		**-**		**-**		**-**		**100**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	**Persen**	**100**	**100**			**100**		**-**		**-**		**-**		**100**		
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	**Persen**	**100**	**100**			**100**		**-**		**-**		**-**		**100**		
4.03.4.03.01.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	100	100	-	-	100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	100	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen	82	82	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	82	82	-	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persen	100	100	-	-	100	21.600.000	-	-	-	-	-	-	100	21.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persen	100	100	-	-	100	120.092.000	-	-	-	-	-	-	100	120.092.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.07.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persen	100	100	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persen	82	82	-	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen	82	82	-	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	100	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Kualitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persen	100	100	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.19	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Persen	100	100	-	-	100	69.750.000	-	-	-	-	-	-	100	69.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.22	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Persen	100	100	-	-	100	21.600.000	-	-	-	-	-	-	100	21.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.30	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.07.32	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.33	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Mebeleur	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	85	85	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.52	Pemeliharaan Taman Halaman Gedung Kantor Bappeda	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Halaman Gedung Kantor Bappeda	Persen	85	85	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kearsipan	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.54	Penataan Ruang Arsip	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Arsip	Persen	85	85	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persen	85	85	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.07.66	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persen	82	82	-	-	100	85.000.000	-	-	-	-	-	-	100	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.69	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persen	82	82	-	-	100	85.000.000	-	-	-	-	-	-	100	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.75	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	80	80	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.81	Peningkatan Aparatur Perencana Bappeda	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Aparatur Perencana Bappeda	Persen	80	80	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.87	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen	100	100	-	-	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.90	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persen	100	100	-	-	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.91	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Persen	100	100	-	-	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	100	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.92	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	-	-	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	100	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.07.93	Penyusunan Rencana Anggaran	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran	Persen	100	100	-	-	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.97	Premi Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	Meningkatnya Kualitas Premi Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	Persen	100	100	-	-	100	12.600.000	-	-	-	-	-	-	100	12.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.98	Pemasangan Desain Interior Bappeda dan Litbang	Meningkatnya Kualitas Pemasangan Desain Interior Bappeda dan Litbang	Persen	85	85	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.07.99	Pembangunan Kamar Mandi Lantai 2 Bappeda dan Litbang	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kamar Mandi Lantai 2 Bappeda dan Litbang	Persen	85	85	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**3.645.211.778**	**100**	**1.170.450.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**4.815.661.778**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
4.03.4.03.01.21.01	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Persen	100	100	100	135.211.778	-	-	-	-	-	-	-	-	100	135.211.778	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.02	Pemetaan Batas Wilayah Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pemetaan Batas Wilayah Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.03	Pembuatan Peta Tematik Penggunaan Lahan	Meningkatnya Kualitas Pembuatan Peta Tematik Penggunaan Lahan	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.04	Penyusunan Studi Kelayakan Pembukaan Pintu Tol Cikopo-Palimanan di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Studi Kelayakan Pembukaan Pintu Tol Cikopo-Palimanan di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.05	Penyusunan Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.06	Sinergitas Perencanaan Keciptakaryaan	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Perencanaan Keciptakaryaan	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.07	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.08	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.09	Sinergitas Penyelenggaraan CSR Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Penyelenggaraan CSR Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.10	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.11	Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.12	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Lingkup Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Lingkup Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.13	Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Kualitas Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.14	Pro Poor Planning and Budgeting (Lanjutan)	Meningkatnya Kualitas Pro Poor Planning and Budgeting (Lanjutan)	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.15	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	75.000.000	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.16	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	Meningkatnya Kualitas Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.17	Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020	Meningkatnya Kualitas Penyusunan KUA dan PPAS Murni APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.18	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakata Tahun 2020	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakata Tahun 2020	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.19	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.20	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019	Meningkatnya Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019	Persen	100	100	100	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.21	Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	Meningkatnya Kualitas Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.22	Pemeliharaan Sistem E-Planing Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Sistem E-Planing Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	100	100	100.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.23	Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov Tahun 2019)	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov Tahun 2019)	Persen	100	100	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.24	Evaluasi Perizinan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Perizinan Pengendaliaan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	Persen	100	100	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.25	Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	Persen	100	100	100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.26	Penguatan Lembaga TKPK (Banprov Tahun 2019)	Meningkatnya Kualitas Penguatan Lembaga TKPK (Banprov Tahun 2019)	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.27	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.28	Sinergitas Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Penanggulangan AIDS Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.29	Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2021	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2021	Persen	100	100	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.30	Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031	Persen	100	100	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.31	Penyusunan Rancangan RKPD	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rancangan RKPD	Persen	100	100	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.33	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.34	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	-	-	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.21.36	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.37	Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	-	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.40	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Perencana Perangkat Daerah Kab. Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Kapasitas SDM Aparatur Perencana Perangkat Daerah Kab. Purwakarta	Persen	100	100	-	-	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.41	Penyusunan Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 - 2023	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 - 2023	Persen	100	100	-	-	100	245.450.000	-	-	-	-	-	-	100	245.450.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.42	Penyelenggaraan Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	-	-	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.21.43	Fasilitasi Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Daerah Non APBD Kab. Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Daerah Non APBD Kab. Purwakarta	Persen	100	100	-	-	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26	**Program Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan yang Ditetapkan**	**Persen**	**85**	**86**	**87**	**389.254.112**	**93**	**500.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**889.254.112**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.26.01	Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	Persen	85	86	87	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.02	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya	Persen	85	86	87	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.03	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	Persen	85	86	87	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.04	Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan dan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta	Persen	85	86	87	75.000.000	93	150.000.000	-	-	-	-	-	-	87	225.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.05	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	85	86	87	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.06	Bintek Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas	Persen	85	86	87	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.26.09	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) 2018 dan Tapkin 2019	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (LAKIP) 2018 dan Tapkin 2019	Persen	85	86	87	64.254.112	-	-	-	-	-	-	-	-	87	64.254.112	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.10	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	85	86	87	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.11	Evaluasi Emplementasi RKPD Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Emplementasi RKPD Kabupaten Purwakarta	Persen	85	86	87	50.000.000	93	100.000.000	-	-	-	-	-	-	87	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.12	Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan DAK Tahun 2020	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan DAK Tahun 2020	Persen	85	86	87	-	93	100.000.000	-	-	-	-	-	-	87	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.26.13	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020	Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020	Persen	85	86	87	-	93	150.000.000	-	-	-	-	-	-	87	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27	**Program pengembangan Data/Informasi**	**Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Tersedia**	**Dokumen**	**7**	**7**	**7**	**340.955.459**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**340.955.459**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.27.02	Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Data/Informasi Bidang Sosial Budaya	Dokumen	7	7	7	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.27.03	Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Basis Data Bidang Ekonomi	Dokumen	7	7	7	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.04	Pengembangan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	Dokumen	7	7	7	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.05	Sosialisasi SIDa dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kualitas	Dokumen	7	7	7	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.06	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purwakarta	Dokumen	7	7	7	43.455.459	-	-	-	-	-	-	-	-	7	43.455.459	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.07	Penyusunan Basis Data Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Basis Data Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	7	7	7	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.09	Pembuatan Website Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pembuatan Website Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Dokumen	7	7	7	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.10	Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional di Kabupaten Purwakarta	Dokumen	7	7	7	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.27	**Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi**	**Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi**	**Persen**	**80**	**80**	**80**	**-**	**83**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83**	**50.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
4.03.4.03.01.27.04	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	-	-	83	10.000.000	-	-	-	-	-	-	83	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.05	Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	-	-	83	10.000.000	-	-	-	-	-	-	83	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.06	Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	-	-	83	10.000.000	-	-	-	-	-	-	83	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.07	Kompilasi Hasil Kinerja Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Kompilasi Hasil Kinerja Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80	80	-	-	83	10.000.000	-	-	-	-	-	-	83	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.27.08	Pengelolaan CSR	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan CSR	Persen	80	80	-	-	83	10.000.000	-	-	-	-	-	-	83	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28	**Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah**	**Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah**	**Persen**	**80**	**80**	**80**	**-**	**83**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83**	**200.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.28.05	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28.06	Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28.07	Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Persen	80	80	80	-	83	50.000.000	-	-	-	-	-	-	83	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28.08	Kompilasi Hasil Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya Kualitas Kompilasi Hasil Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28.09	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW	Meningkatnya Kualitas Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.28.10	Pemetaan dan Fasilitasi Substansi Revisi RTRW	Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Fasilitasi Substansi Revisi RTRW	Persen	80	80	80	-	83	50.000.000	-	-	-	-	-	-	83	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.29	**Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya**	**Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya**	**Persen**	**80**	**80**	**80**	**-**	**83**	**275.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83**	**275.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.29.05	Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Sinkronisasi Target Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.29.06	Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kinerja Prioritas Pembangunan lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Persen	80	80	80	-	83	50.000.000	-	-	-	-	-	-	83	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.29.07	Kompilasi Hasil Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Kompilasi Hasil Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Dan Budaya	Persen	80	80	80	-	83	25.000.000	-	-	-	-	-	-	83	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.29.08	Penguatan Lembaga TKPKD	Meningkatnya Kualitas Penguatan Lembaga TKPKD	Persen	80	80	80	-	83	100.000.000	-	-	-	-	-	-	83	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.29.09	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan	Persen	80	80	80	-	83	75.000.000	-	-	-	-	-	-	83	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.30	**Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**80**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**-**		**-**		**10.757.216.471**		**11.102.969.910**		**11.683.655.236**		**33.543.841.617**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**-**	**-**	**-**		**-**		**B**		**B**		**B**		**B**		
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**90**		**90**		**90**		**90**		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	90	94.997.570	90	144.997.570	90	200.682.896	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	90	8.091.242.094	90	8.091.242.094	90	8.166.242.094	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	90	204.390.421	90	304.390.421	90	404.390.421	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	90	1.145.685.067	90	1.195.685.067	90	1.245.685.067	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	90	355.216.966	90	455.216.966	90	555.216.966	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang di Bappelitbangda	Persen	-	-	-	-	-	-	90	329.451.400	90	379.451.400	90	429.451.400	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bappelitbangda	Persen	-	-	-	-	-	-	90	536.232.953	90	531.986.392	90	681.986.392	90		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**						**-**		**-**		**1.677.275.484**		**1.759.351.591**		**1.851.365.679**		**5.287.992.754**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
		1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**94**		**95**		**96**		**96**		
		3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**94**		**95**		**96**		**96**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persen	-	-	-	-	-	-	100	901.097.432	100	901.097.432	100	993.111.520	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100	379.918.007	100	379.918.007	100	379.918.007	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	-	-	-	-	-	100	396.260.045	100	478.336.152	100	478.336.152	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**						**-**		**-**		**2.165.016.248**		**2.283.208.789**		**2.402.620.609**		**6.850.845.646**	**Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an Daerah**
		1 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**85**		**87**		**89**		**89**		
		2 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**85**		**87**		**89**		**89**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persen**	**-**	**-**	**-**		**-**		**85**		**87**		**89**		**89**		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	-	-	-	-	-	100	993.171.656	100	1.068.171.656	100	1.118.171.656	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	-	-	-	-	-	-	100	574.999.189	100	574.999.189	100	624.999.189	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	-	-	-	-	-	-	100	596.845.403	100	640.037.944	100	659.449.764	100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5,05	**Penelitian dan Pengembangan**						**-**		**275.000.000**		**764.576.929**		**804.567.396**		**846.646.271**		**2.690.790.596**	
4.03.4.03.01.33	**Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK**						**-**		**200.000.000**		**-**		**-**		**-**		**200.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		1. Persentase Penelitian Pembangunan yang Sesuai Dengan Kebutuhan	**Persen**	**80**	**85**	**90**		**93**		**-**		**-**		**-**		**93**		
		2. Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah	**Persen**	**80**	**85**	**90**		**93**		**-**		**-**		**-**		**93**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.33.01	Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Penguatan Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persen	80	85	90	-	93	50.000.000	-	-	-	-	-	-	93	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.33.02	Kajian Pengembangan Potensi Kerjasama Antar Daerah Wilayah Perbatasan	Meningkatnya Kualitas Kajian Pengembangan Potensi Kerjasama Antar Daerah Wilayah Perbatasan	Persen	80	85	90	-	93	50.000.000	-	-	-	-	-	-	93	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.33.03	Pengembangan SIDa dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Kualitas Pengembangan SIDa dan Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Persen	80	85	90	-	93	50.000.000	-	-	-	-	-	-	93	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.33.04	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta	Persen	80	85	90	-	93	25.000.000	-	-	-	-	-	-	93	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.33.05	Kajian Dampak Ekonomi Taman Air Mancur Sribaduga dan Diorama	Meningkatnya Kualitas Kajian Dampak Ekonomi Taman Air Mancur Sribaduga dan Diorama	Persen	80	85	90	-	93	25.000.000	-	-	-	-	-	-	93	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.31	**Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembangunan**	**Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	**Persen**	**80**	**85**	**90**	**-**	**93**	**75.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93**	**75.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
4.03.4.03.01.31.05	Penyusunan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Basis Data Terpadu Kabupaten Purwakarta	Persen	80	85	-	-	93	15.000.000	-	-	-	-	-	-	93	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.03.4.03.01.31.09	Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purwakarta	Persen	80	85	-	-	93	15.000.000	-	-	-	-	-	-	93	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.31.10	Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2020	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2020	Persen	80	85	-	-	93	20.000.000	-	-	-	-	-	-	93	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.31.11	Updating Website Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Updating Website Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta	Persen	80	85	-	-	93	25.000.000	-	-	-	-	-	-	93	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Tingkat Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**-**	**-**	**-**	**-**		**764.576.929**		**804.567.396**		**846.646.271**		**2.415.790.596**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
		1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**94**		**95**		**96**		**96**		
		2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**94**		**95**		**96**		**96**		
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	-	-	-	-	-	-	94	201.087.695	95	201.087.695	96	218.166.570	96	620.341.960	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	94	143.932.251	95	183.922.718	96	198.922.718	96	526.777.687	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	-	-	-	-	-	-	94	419.556.983	95	419.556.983	96	429.556.983	96	1.268.670.949	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappelitbangda

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Strategik dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	86	87	88	89	90	90
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Harmonis dan Berkelanjutan	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	80	80	81	82	83	83

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	50	60	65	70	75	75

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 termasuk dalam Tahapan Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.

Oleh karena itu, Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada perubahan rencana strategis.

Tersusunnya perubahan rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Visi, Misi dan Program Tahun 2018- 2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kedua. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu: "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA", dengan Misi sebagai berikut : *Misi Kesatu* Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; *Misi Kedua*, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; *Misi Ketiga,* Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan *Misi Keempat*, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu : "Mewujudkan Produk-Produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Sesuai Dengan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Melalui Ketersediaan Data dan Informasi Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan".

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan :

(1) Strategi;
(2) Kebijakan; dan
(3) Indikator yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III, IV dan jabatan fungsional perencana.

Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan kewajiban seluruh insan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Purwakarta yang terkait dengan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
3) Mensosialisasikan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini.